

## Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Kantong Plastik Berbayar di Daerah Bandung Selatan

Socialization Government Policy on Plastic Bags Paid in The South Bandung Area

<sup>1</sup>Shafira Resti Ferina, <sup>2</sup>Maman Chatamallah

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Public Relations, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung,*

*Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*Email: <sup>1</sup>r.ferinashafira@yahoo.com*

**Abstract.** *This research is motivated by the development of the waste problem that often occurs in Bandung and has been in a state of emergency. The focus of this study is to investigate and analyze the stages of dissemination of government policy regarding plastic bags paid. The method used in this research is descriptive qualitative data collection through interviews, literature study and observation. This research was conducted in three districts, namely South Bandung area is Baleendah, Dayeuhkolot, and Bojongsoang. This study was conducted to some modern retail stores in the area on the basis of the data obtained from BPLH Bandung. The theory used in this study using the theory of socialization by George Herbert Mead in Sociology Book An introduction Soerjono Soekanto about the stages of socialization: the preparation phase, phase mimics, the stage is ready to act, and the stage of acceptance with the results: the preparation phase, the government involve retailers in disseminating advance and educate the public through various media and make posters in stores for consumers to understand the negative impact of plastic waste on the environment. This policy has been disseminated through circulars KLHK SE. 1230 dated February 17, 2016 and will be implemented in all the mini gradually; mimic stage, the application of plastic bags Pay Policy is a new thing for Indonesia, but not so for some other Asian countries. Such as Bangladesh that have implemented this policy in advance ie since 2002, India in 2003, China in 2008, and Burma in 2009; stage ready to act, in the city of Bandung itself has no legislation regulating this matter since the leadership of Dada Rosada ie Regulation No. 17 Year 2012 on Reducing Use of Plastic Bags that can make it as big capital in implementing policies paid plastic bags; the acceptance phase, from the producer side, a positive impact in terms of understanding the purpose of policy application by offering a substitute for shopping bags.*

**Keywords:** Socialization, Government Policy, Plastic Bags Paid.

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan permasalahan sampah yang sering terjadi di Kota Bandung dan sudah berada dalam kondisi darurat. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tahap-tahap sosialisasi kebijakan pemerintah mengenai kantong plastik berbayar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan, dan observasi. Penelitian ini dilakukan di tiga Kabupaten Daerah Bandung Selatan yaitu Baleendah, Dayeuhkolot, dan Bojongsoang. Penelitian ini dilakukan kepada beberapa toko ritel modern di daerah tersebut dengan berdasarkan kepada data yang diperoleh dari BPLH Kota Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teori Sosialisasi menurut George Herbert Mead dalam Buku Sosiologi Suatu pengantar Soerjono Soekanto mengenai tahap-tahap sosialisasi yaitu : tahap persiapan, tahap meniru, tahap siap bertindak, dan tahap penerimaan dengan hasil penelitian : tahap persiapan, pemerintah melibatkan peritel dalam mensosialisasikan terlebih dahulu dan mengedukasi masyarakat melalui berbagai media serta melakukan pemasangan poster di toko agar konsumen mengerti tentang dampak negatif limbah plastik bagi lingkungan. Kebijakan ini sudah disosialisasikan melalui surat edaran KLHK SE. 1230 tertanggal 17 Februari 2016 dan akan diberlakukan di seluruh minimarket secara bertahap ; tahap meniru, penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar ini merupakan hal baru bagi Indonesia, namun tidak begitu bagi beberapa negara di Asia lainnya. Seperti Bangladesh yang telah menerapkan kebijakan ini terlebih dahulu yaitu sejak tahun 2002, India pada tahun 2003, China pada tahun 2008, dan Burma pada tahun 2009 ; tahap siap bertindak, di Kota Bandung sendiri sudah ada Perda yang mengatur hal tersebut sejak kepemimpinan Dada Rosada yaitu Perda Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang bisa menjadikannya sebagai modal besar dalam penerapan kebijakan kantong plastik berbayar ; tahap penerimaan, dari sisi produsen, berdampak positif dalam hal pemahaman maksud tujuan penerapan kebijakan dengan cara menawarkan pengganti kantong belanja.

**Kata Kunci:** Sosialisasi, Kebijakan Pemerintah, Kantong Plastik Berbayar.

## A. Pendahuluan

Permasalahan yang sudah menjadi keadaan darurat di Indonesia adalah permasalahan korupsi, narkoba, dan juga bencana alam. Namun dengan perkembangan permasalahan sampah yang terjadi saat ini, ternyata juga sudah layak dikatakan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat. Di samping karena volumenya yang terus meningkat, kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pengelolaan sampah dengan cara yang benar masih belum terwujud.

Maka untuk meminimalisir masalah tersebut per tanggal 21 Februari 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar dengan harga Rp. 200/plastik pada seluruh toko ritel modern di 22 kota besar se-Indonesia. Kebijakan ini merupakan suatu upaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat sampah plastik yang berlebihan.

Komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam hidup bermasyarakat. Karena hal itu merupakan satu faktor terfatal untuk menciptakan interaksi sosial dan hubungan sosial.

Komunikasi merupakan elemen penting bagi proses sosialisasi dalam masyarakat. Karena tanpa adanya komunikasi antar anggota masyarakat, proses sosialisasi tidak akan dapat berlangsung. Jadi, dengan adanya komunikasi, proses sosialisasi dalam masyarakat akan dapat berlangsung secara maksimal.

Proses sosialisasi tercipta berasal dari interaksi sosial, dan interaksi sosial tercipta dari Komunikasi yang berjalan lancar. Ketiga hal itu tak mampu dipisahkan karena saling berkaitan, dan harus ada untuk menciptakan sosialisasi yang maksimal, sehingga harus ada unsur-unsur yang telah disebutkan di atas.

Jadi, komunikasi mendukung dan menjadi faktor utama terjadinya suatu sosialisasi di dalam masyarakat. Karena tanpa adanya komunikasi, proses sosialisasi di dalam masyarakat tidak akan berlangsung ataupun tercipta secara baik.

Kebijakan kantong plastik berbayar sebenarnya bertujuan untuk mencegah warga masyarakat agar tidak menggunakan kantong plastik saat berbelanja di supermarket atau pusat perbelanjaan. Oleh karena itu, kantong plastik yang sebelumnya gratisan, kini berbayar. Harganya pun ditetapkan Rp. 200 per kantong. Namun, di lapangan ceritanya lain.

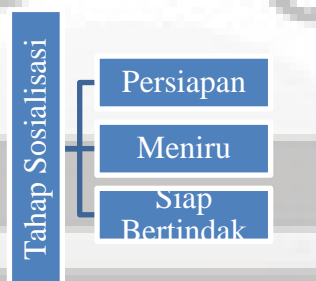
Pertama, banyak terjadi kesalahpahaman, baik petugas supermarket maupun warga masyarakat. Di banyak supermarket, para petugas kerap langsung mengenakan tarif Rp. 200 per kantong saat konsumen membayar barangbelanjaan. Tidak ada komunikasi, apakah konsumen perlu menggunakan kantong plastik atau tidak. Tidak ada dialog. Kalaupun ada protes, penjelasan yang kerap muncul adalah sekadar mengikuti aturan pemerintah. Tidak ada penjelasan, bahwa aturan itu bertujuan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Padahal, kalau pemahaman konsumen memadai, dan sadar lingkungan, mereka bisa membawa tas belanja dalam berbagai bentuk dari rumah.

Kedua, harga kantong terlalu murah. Kalau tujuannya adalah untuk mencegah pembeli menggunakan kantong plastik, harga Rp. 200 per kantong terlalu murah. Ini pula yang disampaikan Wali kota Bandung Ridwan Kamil. Ia pun mengaitkan dengan hasil evaluasi atas sejumlah insiden banjir di kota Bandung, bahwa sebagian besar disebabkan sumbatan pada saluran air akibat sampah plastik. Bahkan ia menyebut 70% penyebab sumbatan saluran air adalah sampah plastik. Karena itu, demi tujuan mencegah penggunaan kantong plastik, sang wali kota akan mengevaluasi harga kantong plastik tersebut sampai Juni 2016, dan diharapkan bisa lebih mahal dari saat ini. Ia menyebut angka di kisaran Rp. 2.000 per kantong lebih masuk akal.

Ketiga, kelemahan sosialisasi menjadikan isu kantongplastik berbayar terpeleset atau dipelesetkan ke arah lain. Kebijakan ini dipahami seakan-akan pemerintah hendak memperdagangkan kantong plastik, atau mencari pendapatan dari kantong plastik. Isu yang tidak berdasar ini mudah diolah dan digulirkan, karena dibarengi dengan berbagai informasi mengenai anggaranpemerintah yang tengah mengalami tekanan dari sisi penerimaan. Namun, jelas yang terakhir ini adalah politisasi dari kebijakan kantong plastik berbayar. Padahal, kebijakan mengenai kantong plastik berbayar ini merupakan salah satu terobosan dalam mendidik warga agar sadar lingkungan. Pasalnya, penggunaan kantong plastik dewasa ini sudah nyaris tidak terkontrol dan memberi kontribusi signifikan bagi penumpukan sampah dan ketidakseimbangan lingkungan hidup.

## B. Landasan Teori

**Sosialisasi menurut George Herbert Mead dalam Buku Sosiologi Suatu Pengantar, Soerjono Soekanto**



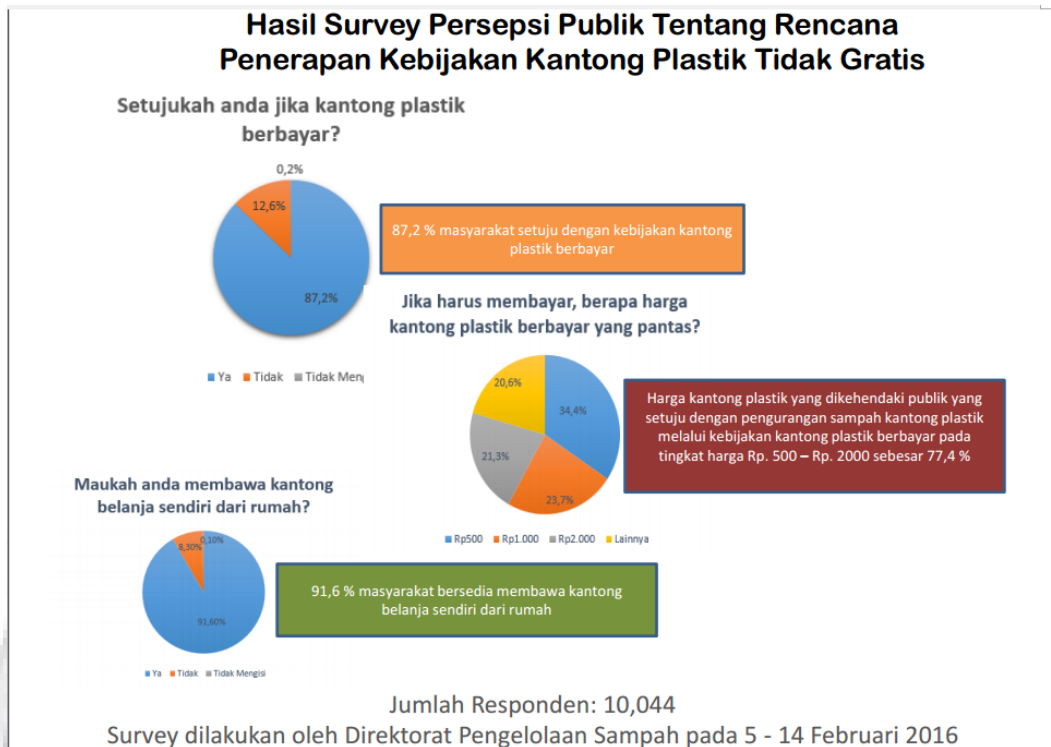
**Gambar 1.** Tahap Sosialisasi

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### Tahap Persiapan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kemudian berencana menerapkan satu kebijakan yang dianggap bisa mengurangi pencemaran kantong plastik dengan mekanisme dan harga kantong plastik yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Semua pihak mendukung sepenuhnya kebijakan tersebut dan berkomitmen melakukan uji coba mulai 21 Februari sampai dengan Juni 2016 di 23 kota.
2. Usaha ritel tidak lagi menyediakan kantong plastik gratis, konsumen wajib membeli seharga minimal Rp. 200/kantong termasuk PPN dengan mekanisme jual putus, artinya kantong plastik itu sebagai barang dagangan.
3. Pemerintah daerah dan Pengusaha melakukan evaluasi setelah 3 bulan uji coba, termasuk harga.



**Gambar 2.** Hasil Survey Persepsi Publik Tentang Rencana Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis

### Tahap Meniru

Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar ini merupakan hal baru bagi Indonesia, namun tidak begitu bagi beberapa negara di Asia lainnya. Seperti Bangladesh yang telah menerapkan kebijakan ini terlebih dahulu yaitu sejak tahun 2002, India pada tahun 2003, China pada tahun 2008, dan Burma pada tahun 2009.

#### 1. Bangladesh

Banjir besar yang melanda 2/3 negara ini menjadi alasan terkuat mereka untuk tidak hanya mengurangi, tetapi melarang pemakaian kantong plastik. Bagaimana tidak, penyebab terbesar dari banjir besar tersebut ternyata kantong-kantong plastik yang menyumbat saluran-saluran air di sana. Akhirnya tahun 2002 Bangladesh menjadi negara yang pertama kali melakukan gerakan anti kantong plastik ini. Penggantinya yaitu tas berbahan goni atau bahan lain yang bisa terurai dengan mudah di alam.

#### 2. India

India menjadi negara berikutnya yang melarang kantong plastik sejak tahun 2003. Sejak saat itu berbagai proses produksi, penyimpanan, penjualan, hingga distribusi serta penggunaan kantong plastik dilarang sama sekali. Himachal Pradesh mengeluarkan kebijakan ini dikarenakan keberadaannya sampah kantong plastik ini lagi-lagi dinilai memperburuk banjir yang terjadi di sana. Selanjutnya baru diterapkan di Mumbai dan Maharashtra pada tahun 2005, Chandigarh dan New Delhi pada tahun 2008, serta Kerala dan Rajashtan pada tahun 2010.

#### 3. China

China, sebagai negara penyumbang sampah terbesar pertama di dunia baru melakukan langkah nyata untuk mengurangi sampah kantong plastik ini pada tahun 2008. Penerapannya mirip dengan di Indonesia, hanya saja mereka sudah sampai pada tahap pembatasan produksi, penjualan, dan penggunaan kantong plastik. Jadi jika ada



yang masih memerlukannya tidak diberikan secara cuma-cuma. Hasilnya, 3 tahun setelah kebijakan ini dijalankan, penggunaan kantong plastik ini turun hingga 24 miliar setara dengan 60.000 ton plastik hingga dapat memangkas emisi lebih dari 10.000 ton CO<sup>2</sup>.

#### 4. Burma/Myanmar

Di negara tetangga kita ini, kebijakan pelarangan penggunaan kantong plastik sudah dimulai sejak tahun 2009. Mulai dari kota Mandalay, lalu disusul Yangoon di tahun 2011. Kita tetap kalah cepat dari mereka. Padahal Indonesia sendiri termasuk negara kedua di dunia yang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar setelah China.

### Tahap Siap Bertindak

SE Tahap I : SE-06/PSLB3-PS/2015

Tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar pada Usaha Ritel Modern (sudah ada sejak tanggal 17 Desember 2015 namun baru mulai diberlakukan tanggal 21 Februari 2015)

Uji Coba : 21 Februari 2016 – 31 Mei 2016 (diserahkan kepada masing-masing peritel)

Hasil :

1. Adanya korelasi jumlah penduduk dengan perilaku konsumtif masyarakat.
2. Dinilai sebagai bentuk ketidakadilan (sebagai barang dagangan untuk dijadikan ladang bisnis bagi peritel).
3. Peritel kembali menggratiskan kantong plastik namun ada juga yang masih melanjutkan kebijakan tersebut.

SE Tahap II : S.1230/PSLB3-PS/2016

Tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kebijakan (terbit tanggal 8 Juni 2016)

Uji Coba : 8 Juni 2016 – Akhir Tahun 2016 (diserahkan kepada Pemda)

Hasil :

1. Pengusaha masih mengalami kerugian meskipun kantong plastik tidak gratis.
2. Biaya kantong plastik jadi beban produksi.
3. Pemerintah dinilai tunduk pada pengusaha.
4. Intervensi pengusaha.
5. Di Kota Bandung sendiri sudah ada Perda yang mengatur hal tersebut sejak kepemimpinan Dada Rosada yaitu Perda Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

### Tahap Penerimaan

**Tabel 1.** Hasil Penelitian

No	PRO	PRO dan KONTRA	KONTRA
1.			Akuntabilitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
2.			Pemerintah kurang mensosialisasikan penerapan kebijakan baru tersebut. Alhasil, banyak masyarakat yang merasa

No	PRO	PRO dan KONTRA	KONTRA
			hak belanjanya telah diambil.
3.			Perlu sosialisasi yang panjang.
4.			Seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
5.	Mengubah kebiasaan.		
6.			Sempat menimbulkan tanda tanya dan penafsiran yang beragam.
7.			Perlu pemahaman secara jelas. Posisi kebijakan lemah secara hukum.
8.	Beberapa Anggota APRINDO sudah sejak lama memulainya dengan beragam mekanisme.		
9.	Peritel juga akan membantu pemerintah untuk mensosialisasikan terlebih dahulu dan mengedukasi masyarakat melalui berbagai media serta melakukan pemasangan poster di toko agar konsumen mengerti tentang dampak negatif limbah plastik bagi lingkungan.		
10.	Sudah disosialisasikan melalui surat edaran KLHK SE. 1230 tertanggal 17 Februari 2016.		
11.	Uang hasil penjualan akan diserahkan kepada pemerintah untuk dikonversikan menjadi fasilitas atau program masyarakat dalam mendukung kebijakan. Uang tersebut dikembalikan kepada pihak riteler untuk dialokasikan kembali pada pembelian kantong plastik.		
12.			Harga jual masih di bawah harga produksi. Perlu adanya kesetaraan harga.
13.	Berdampak positif dalam mengubah perilaku masyarakat.		
14.	Akan diberlakukan di seluruh mini market. Target berikutnya adalah pasar tradisional.		
15.		Harus dibarengi dengan pemahaman masyarakat.	
16.	Pemberlakuan kebijakan tersebut membuat Kota Bandung selangkah lebih maju.		

No	PRO	PRO dan KONTRA	KONTRA
17.	Sosialisasi akan sering dilakukan pemerintah melalui program edukasi		
18.	Uji coba hingga Juni 2016 (bertahap)		
19.			Rp. 200/kantong plastik yang digunakan dinilai masih belum efektif dalam mengubah sikap masyarakat (akan mengalami kenaikan)
20.			Biaya produksi untuk satu brand adalah sebesar Rp 100 M/tahun. (belum adanya kesetaraan)
21.		Harus sesuai segmen.	
22.			Belum optimal.
23.		Tanggungjawab peritel (dalam mensosialisasikan). (indikator keberhasilan sosialisasi)	
24.			Subsidi hasil penjualan bagi peritel.
25.			Penyalahgunaan hasil penjualan.
26.			Memberatkan konsumen.
27.			Harga kantong plastik terlalu murah sehingga masyarakat masih kurang bijak dalam mengelola limbah pabriknya.
28.	Penggunaan kantong plastik turun 30% sejak adanya kebijakan.		
29.		Perlu adanya transparansi (dari selisih harga produksi dan berapa penyisihan untuk lingkungan minimal Rp 1000/kantong plastik (YLKI)	
30.			Tidak ada data akurat mengenai alasan diberlakukannya kebijakan.

## D. Kesimpulan

### 1. Tahap Persiapan

Pemerintah melibatkan peritel dalam mensosialisasikan terlebih dahulu dan mengedukasi masyarakat melalui berbagai media serta melakukan pemasangan poster di toko agar konsumen mengerti tentang dampak negatif limbah plastik bagi lingkungan. Kebijakan ini sudah disosialisasikan melalui surat edaran KLHK SE. 1230 tertanggal 17 Februari 2016 dan akan diberlakukan di seluruh minimarket secara bertahap.

### 2. Tahap Meniru

Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar ini merupakan hal baru bagi Indonesia, namun tidak begitu bagi beberapa negara di Asia lainnya. Seperti Bangladesh yang telah menerapkan kebijakan ini terlebih dahulu yaitu sejak tahun 2002, India pada tahun 2003, China pada tahun 2008, dan Burma pada tahun 2009.

### 3. Tahap Siap Bertindak

Di Kota Bandung sendiri sudah ada Perda yang mengatur hal tersebut sejak kepemimpinan Dada Rosada yaitu Perda Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang bisa menjadikannya sebagai modal besar dalam penerapan kebijakan kantong plastik berbayar.

### 4. Tahap Penerimaan

Dari sisi produsen, berdampak positif dalam hal pemahaman maksud tujuan penerapan kebijakan dengan cara menawarkan pengganti kantong belanja. Sedangkan dari sisi konsumen, meskipun masih menuai pro dan kontra dalam menanggapi penerapan kebijakan kantong plastik berbayar ini, namun sebagian masyarakat yang mendukung adanya kebijakan ini sudah mulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan cara membawa kantong plastik sendiri dari rumah ketika berbelanja.

## Daftar Pustaka

- Moleong, LexyJ.2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remadja Rosdakarya.
- Morissan. 2013. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Goup
- Mulyana, Deddy. 2000. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Poerwandari, Kristi. 2005. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: Fakultas Psikologi UI.
- Soehartono, Irawan. 2002 *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Strauss, Anselm dan Corbin Juliet. 2010. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.